

PENGARUH PENDUDUKAN JEPANG TERHADAP PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA

THE INFLUENCE OF JAPANESE OCCUPATION ON THE INDONESIAN INDEPENDENCE MOVEMENT

Lidia Esmeralda Gracela, Anggar Kaswati, YB Jurahman

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
IKIP PGRI Wates

ABTRAK

*Pengaruh Pendudukan Jepang Terhadap Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Proses kedatangan Jepang di Indonesia, (2) Sistem politik pemerintahan Jepang di Indonesia, dan (3) Pengaruh pendudukan Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah secara studi literatur atau studi pustaka dengan beberapa langkah, yaitu: heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan. Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Jepang menguasai Indonesia, setelah Jepang menghancurkan kekuatan Sekutu di Pearl Harbour, karena kekalahan tersebut Sekutu menyerahkan Indonesia kepada Jepang. 2) Jepang melakukan propaganda untuk menarik simpati tokoh pejuang Indonesia, namun karena janji yang tidak segera direalisasikan dan penderitaan rakyat semakin meningkat dengan adanya wabah penyakit, pakaian yang dipakai seperti goni, rami, sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Rakyat mulai membrotak dengan Jepang, pembontakan tersebut dipelopori oleh para kyai dan petani yang tertindas. 3) Koiso merasa kurangnya dukungan dari daerah yang dikuasainya, sehingga untuk menarik simpati maka dikeluarkan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut diberikan dengan pembentukan BPUPKI dan dilanjutkan PPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Sekutu berusaha merebut kekuasaan dari Jepang dengan menjatuhkan bom pada kota Hiroshima dan Nagasaki, dampak dari pengeboman tersebut Jepang mengalami kerugian dan banyak korban. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Situasi yang demikian, Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan *vaccum of power* dimanfaatkan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, meskipun terjadi perbedaan pendapat, namun akhirnya tercapailah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan perjuangan yang penuh semangat pada tanggal 17 Agustus 1945.*

Kata kunci: *Pendudukan Jepang, Pergerakan Nasional, Indonesia .*

ABSTRACT

The Influence of the Japanese Occupation on the Indonesian Independence Movement. This research aims to determine: (1) The process of Japanese arrival in Indonesia, (2) The political system of the Japanese government in Indonesia, and (3) The influence of the Japanese occupation on Indonesian independence. This research uses historical research methods using literature studies or literature studies with several steps, namely: heuristics, source verification or criticism, interpretation and historiography or writing. The results of this research are as follows: 1) Japan controlled Indonesia, after Japan destroyed the Allied forces at Pearl Harbor, because of this defeat the Allies handed over Indonesia to Japan. 2) Japan carried out propaganda to attract the sympathy of Indonesian warrior figures, but because promises were not immediately realized and people's suffering increased due to disease outbreaks, the clothes

they wore were jute and hemp, which caused people's anger. The people began to rebel against Japan, this rebellion was spearheaded by the oppressed clerics and farmers. 3) Koiso felt a lack of support from the areas he controlled, so to attract sympathy he issued a promise of independence for the Indonesian people. This promise was given with the formation of BPUPKI and continued with PPKI which was tasked with preparing for Indonesian independence. Meanwhile, the Allies tried to seize power from Japan by dropping bombs on the cities of Hiroshima and Nagasaki. As a result of the bombing, Japan suffered losses and many casualties. On August 14, 1945 Japan surrendered unconditionally to the Allies. In such a situation, Indonesia experienced a vacuum of power which was utilized to immediately proclaim independence, even though there were differences of opinion, but in the end the Proclamation of Indonesian Independence was achieved with a passionate struggle on August 17 1945.

Keywords: *Japanese Occupation, National Movement, Indonesia.*

Latar Belakang

Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerbu Pearl Harbour, yaitu Pangkalan Armada Amerika Serikat di Pasifik dengan maksud untuk melumpuhkan kekuatan Amerika di Pasifik (G. Moedjanto, 1988: 69). Guna kelancaran usaha tersebut, maka Jepang membagi tugas kepada Angkatan Lautnya. Selain melumpuhkan kekuatan Amerika, penyerbuan ini juga dimaksudkan untuk mencari dan menguasai sumber alam, terutama minyak tanah. Tentara Jepang segera menuju ke Selatan menyerbu Indonesia. Mereka mulai mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Guna menghadapi serbuan tentara Jepang dibentuk gabungan tentara Sekutu yang disebut ABDACOM (*American British Dutch Australian Command*) yang bermarkas di Lembang Bandung. Panglima pasukannya Jenderal Sir Archibald Wavel. Letnan Jenderal Ter Poorten sebagai Panglima tentara Hindia Belanda. Angkatan Perang Belanda melawan serangan Jepang tanpa semangat, berbeda jauh dengan tentara Jepang yang mempunyai semangat tinggi.

Jepang belum menduduki pulau Jawa dan bergerak mengepung dari berbagai penjuru. Untuk merebut Indonesia dari tangan Belanda, Jepang mengerahkan pasukan-pasukan dalam jumlah besar dari tiga angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Angkatan Laut Belanda mencoba menghalang-halangi pendaratan tersebut, ternyata tidak berhasil. Tentara Jepang di bawah pimpinan Jenderal Imamura berhasil melakukan pendaratan di tiga tempat pada tanggal 1 Maret 1942 yaitu di Pantai Banten, Bumiayu, dan Bojonegara. Ternyata Belanda tidak memberi perlawanan yang berlanjut sehingga setelah itu pada tanggal 9 Maret 1942.

Jenderal Ter Poorten, Panglima tentara Belanda di Indonesia menandatangani penyerahan tidak bersyarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan suksesnya serangan kilat Jepang terhadap Belanda, maka bangsa Indonesia semakin percaya janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan. Tentara Jepang datang ke Indonesia mengaku sebagai sahabat. Jepang menyebut dirinya sebagai “Saudara Tua” dari Negeri Matahari Terbit, kelak akan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Kala itu rakyat Indonesia telah menjadi bangsa yang terjajah di bawah kaki kolonialisme Belanda. Kedatangan tentara Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia dalam kemerdekaan yang diimpikan. Namun, demikian impian ini tidak pernah terwujud (G. Moedjanto, 1988: 75). Malahan tentara Jepang memaksa rakyat Indonesia mendukungnya memenangkan perang di Asia Pasifik. Dukungan antara lain berupa logistik, tenaga membangun infrastruktur serta proses pembangunan industri.

Permintaan akan tenaga kerja meningkat ketika situasi perang semakin berkobar, terutama setelah perang beralih memburuk bagi Jepang dalam pertengahan tahun 1943, dan perjuangan mati-matian untuk bertahan telah mulai. Hal ini berarti bahwa tenaga kerja diperlukan tidak hanya untuk eksploitasi ekonomi, tetapi juga untuk proyek-proyek yang secara langsung berkaitan dengan kelangsungan perang. Pada tahap perekrutan *romusha* di Jawa meningkat secara luar biasa dan dampaknya atas masyarakat Jawa menjadi serius.

Pada bulan Januari 1944, Jepang memperkenalkan sistem Tunariguni (rukun tetangga). Tunariguni merupakan kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 10-20 rumah tangga. Beberapa tunariguni dikelompokkan menjadi ku (desa atau bagian kota). Maksudnya untuk mengawasi aktivitas-aktivitas penduduk, untuk mengendalikan mereka dan memperlancarkan pelaksanaan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Karena perang semakin mendesak, maka tugas yang harus segera dilakukan oleh tunariguni adalah mengadakan latihan tentang pencegahan bahaya udara, kebakaran, pemberantasan kabar bohong dan mata-mata musuh.

Pada masa perang Asia-Pasifik mengenal orang Jepang sebagai tentara pendudukan yang sangat kejam dan mudah sekali memukul. Kekejaman dialami oleh puluhan bahkan mungkin ratusan ribu orang Indonesia yang mati sebagai *romusha* dan *heiho*. Pada masa itu segala hasil bumi dan kekayaan Indonesia dikuras habis untuk

kepentingan perang Jepang. Para pemuda kita banyak pula yang menjadi korban nafsu yang jahanam. Pembunuhan terhadap para pemuda Peta yang mengadakan perlawanan terhadap para cendekiawan dan para pejuang kemerdekaan dilakukan dengan kejamnya.

Golongan muda mendengar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka para golongan muda mendesak agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan. Tetapi golongan tua tidak menyetujui dengan alasan harus melalui prosedur yang baik, harus mendapatkan kesepakatan dari keputusan BPUPKI dan PPKI. Sebagai puncak perdebatan ini adalah peristiwa Rengasdengklok dengan menculik kedua Proklamator Kemerdekaan Indonesia Mohammad Hatta dan Soekarno. Pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 04.00 pagi, dan sesampainya di tempat itu, kedua pemimpin bangsa itu dipaksa untuk mengumandangkan proklamasi. Persiapan penyusunan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda, yang hadir adalah Soekarno, Mohammad Hatta, para anggota BPUPKI dan PPKI serta tokoh-tokoh pemuda (Suhartono, 1994: 143). Tujuannya untuk mempersiapkan teks proklamasi, penandatanganan teks proklamasi, pembacaan serta waktu dan tempatnya.

Berdasarkan permasalahan inilah penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai "*Pengaruh Pendudukan Jepang Terhadap Pergerakan Kemerdekaan Indonesia*". Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) Proses kedatangan Jepang di Indonesia, (2) Sistem politik pemerintahan Jepang di Indonesia, dan (3) Pengaruh pendudukan Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mempunyai lima tahap penulisan diantaranya; heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 1980: 89). Tahap pertama yakni heuristik, mencari dan mengumpulkan data-data masa lampau melalui literatur (sumber buku) yang memuat informasi terkait topik yang dibahas. Tahap kedua yakni verifikasi atau melakukan kritik terhadap sumber yang diperoleh. Tahap ketiga yakni interpretasi, mengumpulkan fakta-fakta yang diperoleh kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta yang lain sehingga membentuk rangkaian peristiwa sejarah dan penafsiran terhadap sumber yang digunakan. Tahap terakhir yakni historiografi atau penulisan.

Pembahasan

1. Kedatangan Jepang Di Indonesia

Memasuki era abad ke-20, kemajuan dalam bidang industri dan kepadatan penduduk, akhirnya membawanya menjadi negara penjajah. Penjajahan pertama Jepang dilakukan terhadap Korea pada tahun 1905. Pada masa berikutnya memulai menaklukkan Manchuria, yaitu sebagai kota di Korea dan penghasil batu bara yang menjanjikan buat komoditi ekspor, kota ini pernah menjadi persengketaan antara Jepang dan Cina. Masalah bermula ketika Cina ingin membayar hutang dan menyewakan wilayah ini, karena satu dan lain hal akhirnya persetujuan mereka gagal. Pihak Jepang marah dan menganggapnya sebagai penghinaan. Terjadinya perang berkepanjangan antara keduanya untuk memperebutkan wilayah ini, akhirnya pertempuran dimenangkan oleh Jepang. Pada tahun 1931, Cina pada tahun 1937, dan Asia Tenggara pada 1938. Minat terhadap daerah Asia Tenggara adalah karena ajaran Shintoisme tentang *Hokka-ichiu* yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga manusia sebagai bangsa yang telah maju mempunyai kewajiban untuk mempersatukan bangsa-bangsa di dunia dan memajukannya (G. Moedjanto, 1988: 66).

Jepang menggunakan semboyan “saudara tua”. Karena di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka di sisi lain mereka sebagai saudara tua daerah Timur Raya juga menekankan pada persamaan antara *Shinto* dan Islam. Hal ini mengumbar harapan bahwa Kaisar akan beralih agama dan memeluk agama Nabi Muhammad, dan melukiskan suatu gambar gilang-gemilang tentang dunia kekuasaan Islam yang berpusat di sekitar Kaisar Khalifah Raya. Alasan lain untuk menguasai Indonesia adalah karena masalah ekonomi. Kemajuan Industri ini memaksanya untuk bisa menguasai sumber-sumber alam yang berada di Indonesia terutama minyak tanah, timah, karet, dan lain-lain (G. Moedjanto, 1988: 67).

Jepang menjadi negara militer didahului dengan kuatnya mengubah dirinya menjadi negara industri. Peristiwa Restorasi Meiji pada tahun 1868 merupakan peristiwa di mana ia memulai perubahan dengan momentum-

momentum penting seperti pembuatan mesin-mesin produksi dengan tenaga uap termasuk pembuatan kapal dagang dan kapal perang bertenaga uap Kekuatannya mulai tampak setelah Perang Dunia I. Jepang maju dan berperan, sedangkan negara Eropa belum siap untuk memasuki pasar Asia yang merupakan pasar potensial pada saat itu. Jepang pada saat itu merupakan negara yang paling siap untuk memasuki pasar Asia. Dengan angkutan yang relatif murah, menjadikan mereka tidak tersaingi dalam perdagangan (G. Moedjanto, 1989: 66).

Pada saat itu *Zeibatsu* atau kelompok kaum kapitalis, yaitu kelompok pemilik modal di Jepang. Pada masa pasca Perang Dunia I kelompok ini sangat kesulitan dalam memenuhi bahan mentah industri dan kesulitan dalam memasarkan hasil industrinya. Salah satu cara untuk mengatasi kesulitan tersebut tiada lain adalah mencari wilayah baru yang kaya sumber bahan baku industri sekaligus dapat dijadikan pasar hasil industrinya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kelompok *zeibatsu* mengadakan kerja sama dengan *gunbatsu* (kelompok militer). Secara kebetulan, pada waktu itu kaum ekstrimis- nasionalis di Jepang sedang gencar-gencarnya menuntut kepada pemerintah untuk memperluas pengaruhnya ke daerah Selatan (A.J. Sumarno, 1991: 7).

Pada saat itu situasi dunia menjadi bertambah genting dan perang Dunia II meletus pada 1 September 1939, Hitler menyerbu Polandia dan mulai berkobarlah Perang Dunia II di Eropa. Di Indonesia, GAPI memberi tekanan agar otonomi diberikan dan bisa bekerjasama dalam melawan *fasisme*, namun usulan GAPI tidak ditanggapi. Pada tahun 1940, pemerintah menegaskan tidak akan memberikan otonomi sedikit pun untuk Indonesia dan kekuasaan akan tetap pada tanggung jawab. Pada bulan Mei 1940, Belgia dan Perancis diduduki Jerman. Hitler menyerbu negeri Belanda, pemerintah lari ke pengasingan di London. Namun demikian, tidak mau mengubah status Indonesia dari negara jajahannya. Bahkan memberlakukan Undang-Undang darurat perang, dan segala aktivitas politik dilarang. Pemimpin-pemimpin Indonesia dalam *Volksrad* masih berharap Belanda memberikan kesempatan. Hubungan dengan Indonesia menjadi terputus. Jepang sudah memperhitungkan pula bahwa rencana pembentukan lingkungan ATR (Asia Timur Raya) akan menimbulkan

permusuhan dengan Amerika yang menjadi suplayer minyak tanah terbesar. Karena itu Jepang perlu menyakinkan diri bahwa persediaan minyak tanah untuknya terjamin. Untuk keperluan tersebut Jepang mengirimkan misi perdagangan Kobayashi yang ditemui oleh H.J. Van Mook sebagai wakil pemerintah Hindia pada bulan September 1940 (G. Moedjanto, 1989: 68).

Pada tanggal 8 Desember 1941, kapal perang Angkatan Udara tersebut mengebom ke semua pangkalan tentara Amerika Serikat di kepulauan Hawaii yang merupakan pangkalan tersebar Amerika Serikat di pangkalan udara Tentara Udara Hickam dan kebanyakan kapal terbang Amerika berlabuh di pelabuhan Pearl Harlbour termasuk Barisan Kapal Tempur. Tujuan melakukan serangan ke Pearl Harbour adalah untuk mengamankan dan sekaligus mempercepat penyerbuan ke wilayah Asia Tenggara yang pada saat itu sedang dijajah atau dikuasai oleh Inggris, Belanda, Prancis, dan Amerika Serikat. Pada tanggal 8 Desember 1941 setelah serangan Pearl Harbour, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda Van Starckenborgh Stachouwer mengumumkan perang kepada Jepang (G. Moedjanto, 1989: 69).

Penyerbuan ke Hindia Belanda melakukan serangan dari udara, yang pertama kali dapat dikuasai adalah Tarakan di Kalimantan Timur. Pada tanggal 12 Januari 1942 komandan Belanda di wilayah itu menyerah. Pada tanggal 24 Januari 1942 Balikpapan jatuh kepada Jepang. Selanjutnya Pontianak dapat dikuasai pada tanggal 29 Januari 1942 dan Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942. Kemudian pada tanggal 10 Februari 1942 Banjarmasin jatuh ke tangan tentara. Giliran berikutnya adalah Palembang yang dapat dikuasai oleh Jepang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah berhasil menduduki Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku, Jepang mengepung Pulau Jawa dari berbagai penjuru. Tentara Jepang yang dipergunakan untuk merebut Pulau Jawa berada di bawah Komando Tentara Keenambelas yang dipimpin Jenderal Hitoshi Imamura.

Pada tanggal 27 Februari 1942 Angkatan Udara Jepang menghujani Surabaya sebagai pusat kekuatan armada Belanda di Jawa dengan bom. Pengemboman dilanjutkan ke lapangan terbang Singosari di Malang dan

Maospati di Madiun (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993: 1-2). Sesudah memenangkan pertempuran di Luat Jawa, segera melakukan pendaratan di Pulau Jawa. Pendaratan dilakukan pada tanggal 1 Maret 1942 melalui tiga tempat, yaitu Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Tempat pendaratan tentara ini sama sekali tidak diduga sebelumnya oleh pihak Sekutu. Dari Eretan Indramayu dan Banten, pasukan bergerak menuju Kalijati dan merebutnya tanpa perlawanan yang berarti. Perebutan kembali daerah tersebut oleh Belanda terus dilakukan sampai tanggal 4 Maret 1942, namun Jepang berhasil memukul mundur.

Operasi kilat Detasemen Shoji telah mengakibatkan tentara KNIL kritis. Pada tanggal 6 Maret keluarlah perintah dari Panglima KNIL, Letnan Jenderal Ter Poorten kepada Panglima di Jawa Barat, Mayor Jenderal J.J. Pesman tentang tidak diperbolehkan melakukan pertempuran. Hal itu dikarenakan Bandung menjadi kota mati yang penuh sesak dan banyak penduduk sipil, wanita, dan anak-anak. Tidak lama sesudah keberhasilannya Jepang menduduki KNIL di Lembang, maka pada tanggal 7 Maret 1942 tepat petang hari pasukan-pasukan Belanda di sekitar Bandung menyerahkan diri (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993: 2-5).

Kekuatan invasi Jepang di Jawa menunjukkan jumlah yang lebih besar daripada kekuatan pihak Belanda dan Sekutu. Pertempuran-pertempuran di Jawa berakhir dengan kemenangan di pihak Jepang. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942 pihak Belanda mengakui kekalahannya Gubernur Jenderal Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer maupun Panglima Tentara Hindia Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten pergi ke Kalijati mengadakan pertemuan dengan Letnan Jenderal Imamura. Hasil dari pertemuan mereka adalah kapitulasi (penyerahan) tanpa syarat seluruh angkatan perang Belanda di Indonesia yang diwakili oleh Letnan Jenderal Ter Poorten kepada Imamura (G. Moedjanto, 1989: 72). Yang menandatangani kapitulasi tersebut bukan Gubernur Jenderal Tjarda, melainkan Letnan Jenderal Ter Poorten.

Nampaknya Belanda sengaja meninggalkan kesan bahwa yang menyerah kepada Jepang adalah tantara Belanda, bukan pemerintah Hindia

Belanda. Dengan demikian kelak akan mempermudah Belanda dalam memulihkan kembali kekuasaannya apabila Perang Pasifik telah usai. Pada saat itu tokoh-tokoh nasional sedikit memiliki harapan dengan kemenangan Jepang dalam konflik saat itu, moral dan motivasi bangsa Indonesia semakin kuat dan tumbuh rasa percaya diri akan kemampuannya seperti yang dilakukan Jepang. Dengan kekuasaan atas Indonesia, maka segera melakukan propaganda bahwa segera memajukan bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa yang sudah maju. Propaganda yang dilakukan sangat menarik bangsa Indonesia, baik itu berupa janji-janji maupun dalam bentuk peningkatan ekonomi.

2. Sistem Politik Pemerintahan Jepang Di Indonesia

Jepang meraih kemenangan besar di Asia Pasifik atas wilayah Indonesia. Kemenangan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, yang berisikan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang (G.Moedjanto, 1989: 23). Hal tersebut berarti awal kekuasaan di Indonesia. Pemerintah pendudukan memiliki kebijakan di Indonesia yaitu membagi Indonesia menjadi tiga wilayah. Tiga wilayah Pemerintahan Militer Pendudukan tersebut ialah: “(1) Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara Keduapuluh lima) untuk wilayah Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi. (2) Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara Keenam belas) untuk wilayah Jawa-Madura dengan pusatnya di Jawa. (3) Pemerintahan militer Angkatan Laut (Armada selatan kedua) untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku dengan pusatnya di Makasar” (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1977: 5).

Keberhasilan Jepang menduduki Indonesia adalah diadakannya pemerintahan militer di Pulau Jawa yang sifatnya sementara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.1 pasal 1, yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenam belas pada tanggal 7 Maret 1942, yang antara lain berbunyi sebagai: Bala Tentara Nippon melangsungkan pemerintahan Militer untuk sementara waktu di daerah yang ditempatinya, agar supaya mendatangkan keamanan yang sentausa dengan segera (Sartono Kartodirdjo, 1975: 5).

Kebijakan pemerintah memobilisasi rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari pemerintahan militer dalam keadaan perang tersebut. Upaya mobilisasi massa dilakukan oleh Shimizu dan kantor kepala pemerintahan militer bagian propaganda dengan membentuk Gerakan Tiga A, yang mempopulerkan slogan:

- Jepang Pemimpin Asia
- Jepang Pelindung Asia
- Jepang Cahaya Asia

Semangat Jepang mengadakan gerakan Tiga A yang dilandasi oleh ajaran *Hakko-I Chiu* yaitu ajaran tentang kesatuan manusia, mempunyai keyakinan berkewajiban untuk mempersatukan bangsa-bangsa di dunia dan mendorong untuk menjadi negara maju (G. Moedjanto, 1988 : 66). Kepercayaan tersebut mendorongnya melakukan invasi. Mereka menganggap dirinya sebagai negara terdepan di Asia Timur Raya.

Hasilnya Gerakan Tiga A tidak mendapatkan tempat di hati rakyat Indonesia dan kurang membantu usaha perang. Rakyat tidak tertarik kepada propaganda yang dilakukan oleh Jepang. Melihat hal tersebut, pihak itu merubah kebijakannya dengan melakukan pendekatan terhadap pemimpin nasional rakyat Indonesia. Mereka membebaskan Bung Hatta dan Bung Karno dari pembuangan Belanda. Kedua pemimpin tersebut dijadikan penasehat pemerintah. Kemudian ditambah dua tokoh lagi yaitu Ki Hajar Dewantoro dan Kyai Mansur (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1977: 9). Atas usul Bung Karno maka gerakan Tiga A dibubarkan dan didirikan semacam pergerakan rakyat yang disebut Pusat Tenaga Rakyat yang disingkat PUTERA.

Pada saat itu Jepang akhirnya merasa bahwa PUTERA yang mereka harapkan membantu ternyata tidak menghasilkan apa-apa, maka pada tahun 1944 dibubarkan dan diganti dengan Jawa Hokokai atau kebaktian rakyat Jawa ini suatu organisasi yang dimaksudkan untuk melakukan mobilisasi total di Jawa semata-mata untuk tujuan kepentingan Jepang (Anthoni J.S. Reid, 1996). Pada saat Indonesia menjadi salah satu garis terdepan dalam perang pasifik. Bangsa Jepang berusaha untuk melawan tentara sekutu. Mereka dilatih dalam kesatuan

pasukan sukarela Pembela Tanah Air (PETA) (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1977: 35). Pasukan tersebut tidak ditugaskan di luar negeri. Pada masa kemerdekaan kesatuan PETA ini berguna untuk menyusun kekuatan tentara Indonesia. Mereka sengaja dibentuk dan dipersiapkan untuk membantu didalam negeri. Keadaan yang tidak menguntungkan ini menyebabkan perubahan susunan pemerintahan di Jepang. Pemerintahan Tojo diganti oleh pemerintahan Koiso. Pada permulaan September 1944, Perdana Menteri Kaiso memberikan pernyataan akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia di kelak kemudian hari. Pernyataan ini disambut gembira oleh bangsa dan dibarengi dengan kebijakan baru dengan memperbolehkan Lagu Indonesia Raya dinyanyikan kembali. Pada bulan Mei 1945 dibentuklah suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai Dr. Rajiman Wedodiningrat beranggotakan 60 orang. Badan ini ditugaskan untuk mempersiapkan Undang-Undang Dasar dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI berhasil merancang dasar negara dan Pembukaan Undang-Undang Dasar (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1977: 42). Tugas ini masih belum selesai karena perubahan keadaan yang begitu cepat. Tugas BPUPKI nantinya diselesaikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tampaklah bahwa reaksi berbagai pihak di Indonesia atas pendudukan Jepang bermacam-macam, sebagian ada yang bersedia mengikut propaganda dengan bekerjasama dengan mereka walaupun sebenarnya kegiatan mereka sebagian besar untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri dan sebagian pihak menolak untuk bekerjasama dengan pihak Jepang. Diantara kedua pihak tersebut saling berhubungan dan bekerjasama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

3. Pengaruh Jepang Terhadap Kemerdekaan Indonesia

Pasukan laut Amerika Serikat yang beroperasi di Pasifik Tengah, mempunyai kedudukan yang semakin bagus. Kepulauan Gilbert, Marshal, dan Karolin dapat dikuasai oleh pasukan Amerika Serikat. Pulau Saipan yang merupakan benteng pertahanan dalam pasukan Jepang jatuh ke tangan pasukan

Amerika Serikat pada bulan Juli 1944. Setelah dirampasnya pulau Saipan oleh pasukan Amerika Serikat menyebabkan Tojo mengundurkan diri dari kedudukan Perdana Menteri Jepang dan sembilan hari kemudian pada tanggal 18 Juli 1944 orang yang ditunjuk sebagai penggantinya yaitu Jenderal Koiso yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993: 66). Kekalahan yang dialami oleh tentara Jepang telah menyebabkan kepanikan dalam pemerintahan Jepang dan mereka yang pada awalnya tampak perkasa mulai tertekan. Puncak dari kepanikan itu adalah terjadinya pergantian kepala pemerintahan Jepang.

Sebagai wujud tercapainya kemerdekaan Indonesia dibentuklah BPUPKI yang merupakan langkah konkrit bagi terpenuhinya janji Perdana Menteri Koiso tentang kemerdekaan Indonesia. Badan penyelidik ini diketuai oleh Dr. Radjiman Widjodiningrat. Wakil ketua terdiri dari dua orang yaitu Suroso dari Indonesia dan Khibangase Yoshio dari Jepang. Lima puluh sembilan anggota lainnya termasuk Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dan tokoh lainnya ditambah tujuh orang dari Jepang, sebagai sekretaris diangkat A.G. Pringgodigdo (George Mc Turnan Kahin, 1995: 153).

Pada tanggal 28 Maret 1945 dimulailah upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI. Upacara ini dihadiri oleh Jenderal Itagaki dan Letnan Jenderal Nagano. Upacara itu dilakukan pengibaran bendera Honomaru oleh Mr. AG. Pringgodigdo dan bendera Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. Pengibaran bendera Merah Putih tersebut telah membangkitkan nasionalisme para anggota BPUPKI. Para anggota BPUPKI merasa perjuangan mereka dalam rangka mencapai kemerdekaan mulai menampakkan hasil. Masa persidangan BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama membahas tentang dasar negara merdeka. Mr. Muh Yamin dan Ir. Soekarno kemudian mengusulkan lima dasar filsafat yang dikenal dengan nama Pancasila. Ide pemberian nama lima dasar menjadi Pancasila tersebut atas usul dari seorang ahli bahasa, yaitu Mr. Supomo. Konsepsi tentang dasar filsafat negara Pancasila ini diperkenalkan pada 1 Juni 1945 (G. Moedjanto, 1988: 85).

Sidang BPUPKI pertama ini belum memutuskan tentang Dasar Negara

Indonesia. Tugas itu diselesaikan oleh suatu panitia kecil yang dibentuk beranggotakan sembilan orang dengan ketua Ir. Soekarno, kesembilan orang tersebut adalah:

“(1) Ir. Soekarno. (2) Drs. Moh. Hatta. (3) Mr. Muh. Yamin. (4) Mr. Ahmad Subarjo. (5) Mr. A.A. Maramis. (6) Abdul Kahar Muzakir. (7) H. Agus Salim. (8) Abikusno Tjokrosuroyo. (9) Wachid Hashim”

Panitia sembilan berhasil memutuskan Piagam Jakarta yang berisi tentang rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Menurut Piagam Jakarta rumusan dasar negara tersebut sebagai berikut:

“(1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Persatuan Indonesia. (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. (Sekretariat Negara RI, 1995: 385-86).

Pada tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 7 September 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritzu Zunbi Linkai*) bertugas melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia (G. Moedjanto, 1988: 85). Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdiri dari 21 orang. Ketua badan ini ditunjuk Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Tanpa sepengetahuan Jepang, anggota PPKI ditambah enam orang lagi (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1977: 79).

Pada tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Terauchi memanggil Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ke Dalat Vietnam Selatan menjadi markas besar wakil pemerintah Jepang. Mereka akan dilantik oleh Jenderal Terauchi secara simbolis. Kepergian mereka ditemani Radjiman Widyodiningrat, bekas ketua BPUPKI (G. Moedjanto, 1988: 85). Pada tanggal tersebut bertepatan dengan dijatuhkannya bom atom kedua di Hiroshima setelah bom pertama dijatuhkan di Nagasaki. Peristiwa ini menyebabkan menyerahnya Jepang kepada Sekutu.

Pada tanggal 24 Agustus 1945 dan langkah awal yang akan ditempuh

adalah memanggil anggota Majelis Konstitusi untuk melakukan sidang pada tanggal 19 Agustus guna membicarakan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar yang akan disusun oleh panitia-panitia yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan (M. Ridwan Indra, 1987: 29). Perkembangan situasi perang berkembang semakin cepat dan hari demi hari posisi Jepang semakin terdesak. Akan tetapi perjalanan kembali ke tanah air, tiga tokoh nasionalis ini singgah di Singapura dan bertemu dengan tiga orang anggota PPKI perwakilan Sumatera. Ketiga orang anggota PPKI Sumatera ini adalah Teuku Hassan, Dr. Amir, dan Mr. Abbas yang juga sedang dalam perjalanan menuju Jakarta.

Rombongan Soekarno tiba di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945 pukul 17.00. Siang hari sebelum rombongan itu tiba, sudah terdengar berita tidak resmi tentang menyerahnya Jepang, tetapi tidak seorang pun yang dapat memastikannya. Keesokan harinya radio Jepang dari Tokyo menyiarkan amanat Maharaja Jepang (*Tenno Heiko*) yang memerintahkan penghentian permusuhan terhadap Sekutu. Siaran tersebut disiarkan dalam bahasa Jepang dan dapat diterima di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia hanya sedikit yang mengerti bahasa Jepang dan radio pun masih sangat langka, maka berita tersebut pada awalnya dapat ditutup-tutupi oleh pihak Jepang. Para pemimpin Indonesia, baik golongan muda maupun golongan tua, selalu berusaha untuk memperoleh berita yang teraktual. Setibanya di Indonesia, Soekarno dan Hatta belum begitu yakin akan berita kekalahan Jepang ini. Oleh karena itu mereka menghadap Laksamana Maeda pada hari berikutnya, yaitu tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 15.00 untuk menanyakan kebenaran berita tersebut. Laksamana Maeda tidak dapat memberikan jawaban yang pasti sampai malam hari. Berita kekalahan Jepang, para pemuda ini mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno tetap bertumpu pada janji dan kesepakatannya dengan Jepang yang akan memerdekakan Indonesia dalam waktu yang singkat. Sikap Soekarno ini memicu ketidaksabaran golongan muda ini dan mengamankan dua tokoh Soekarno dan Hatta yang kemudian dikenal dengan peristiwa Rengasdengklok.

Pada pukul 18.00 tanggal 16 Agustus 1945 Ahmad Subardjo tiba di Rengasdengklok. Dia diterima oleh Sukarni yang meneruskannya kepada Mayor Subeno dan melalui perundingan akhirnya pada pukul 21.00, Soekarno-Hatta diajak kembali ke Jakarta dengan tiga mobil yang salah satunya untuk anggota PETA yang merasa khawatir apabila sewaktu-waktu diserang oleh Angkatan Darat Jepang yang tidak bersimpati kepada kemerdekaan Indonesia (G. Moedjanto, 1989: 87). Demikian situasi pada saat menjelang kemerdekaan penuh dengan ketegangan antara pejuang sendiri yaitu antara golongan tua dengan muda, akhirnya bisa mencapai kata sepakat mengenai kemerdekaan.

Perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda terus menghangat, sampai terjadi penculikan terhadap Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. Rengasdengklok adalah asrama tentara PETA yang terletak 75 km Timur Jakarta (Deliar Noer, 1990: 247). Merasakan adanya suatu keadaan tidak baik, Subardjo segera menghubungi tokoh pemuda dan kemudian menjemput kedua tokoh PPKI untuk segera pulang ke Jakarta untuk mengadakan rapat bersama anggota PPKI lainnya. Keadaan ini dianggap penting guna segera merumuskan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Setelah berhasil kembali ke Jakarta, Muhammad Hatta bersama Soekarno segera mengadakan rapat. Rapat PPKI tersebut dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Dalam rapat tersebut, akan dibahas tentang naskah proklamasi, tanggal proklamasi, tokoh pembaca naskah proklamasi dan tempat proklamasi tersebut. Rapat itu dihadiri oleh Muhammad Hatta dan Soekarno beserta anggota PPKI dan dihadiri pula oleh tokoh pemuda (Muhammad Hatta, 1979: 454). Dalam menyusun teks proklamasi tersebut, Muhammad Hatta mendiktekan Soekarno. Hal ini juga didengarkan oleh yang lain seperti Subardjo, Sukarni, Sayuti Melik.

Setelah penandatanganan dilakukan dengan melalui rapat dan disetujui semua peserta segera dilaksanakan waktu dan tempat. Penandatanganan teks proklamasi, menurut Muhammad Hatta perlu dilakukan oleh semua anggota yang hadir. Hal ini meniru proklamasi kemerdekaan

Amerika Serikat juga ditandatangani oleh semua anggota yang hadir. Namun pendapat ini ditolak oleh para pemuda seperti Subardjo dan Sukarni. Menurut pendapat pemuda, ada rapat yang kebetulan hadir, padahal tidak mempunyai saham dalam menyusun kemerdekaan tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan lobi dilakukan Sayuti Melik, penandatanganan dilakukan hanya oleh dua orang yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Mengenai tempat pembacaan proklamasi, ditentukan oleh Soekarno di rumahnya sendiri yaitu Jalan Pegangsaan Timur untuk membacakan teks proklamasi. Setelah sampai di rumahnya Soekarno, upacara pembacaan teks proklamasi segera dimulai. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati Soekarno segera dikibarkan. Lagu Indonesia Raya segera dinyanyikan. Kemudian dibacakan teks proklamasi. Setelah pembacaan itu, para pemimpin Indonesia bersalaman untuk saling mengucapkan selamat (Delier Noer, 1990: 252). Sesudah ia memproklamkan kemerdekaan, Soekarno menjadi tokoh utama Republik. Ia terkenal dengan sebutan Proklamator bersama Moh. Hatta. Dengan demikian tercapailah pada puncaknya Indonesia menjadi bangsa yang bebas, merdeka dan berdaulat tanpa ada bangsa lain yang mengatur hukum di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa: Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerbu Pearl Harbour, sebuah pangkalan armada Amerika Serikat terletak di Hawaii, Samudera Pasifik. Salah satu pendorong penyerbuan tersebut karena Jepang ingin menyaingi bangsa-bangsa Barat yang berkuasa di Asia. Tujuan Jepang menduduki atau menguasai Indonesia adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku bagi keperluan industrinya. Keberhasilan Jepang dalam Restorasi Meiji berdampak pada proses modernisasi di berbagai bidang kehidupan. Rakyat yang hidup pada masa Jepang sangat menderita. Tenaga-tenaga kasar itu diperlakukan sangat buruk, berbagai macam barang-barang diangkut oleh pemerintahan militer Jepang untuk keperluan perang. Pada masa penjajahan kolonial di Hindia Belanda (Indonesia) berakhir ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Kekalahan Belanda disebabkan karena keberhasilan Jepang menduduki

sebagian besar daerah Hindia Belanda, termasuk Batavia. Pada tanggal 8 Maret 1942 akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan memberikan kekuasaannya atas Hindia Belanda pada Jepang.

Kebijakan pemerintahan militer Jepang atas Indonesia. Dalam pelaksanaannya, maka Jepang menerapkan politik pemerintahan di Indonesia. Penerapan politik Jepang yang dimaksudkan untuk memobilisasi seluruh rakyat Indonesia agar membantu kepentingannya. Oleh karena itu politik Jepang akhirnya sama dengan politik penjajahan sebagaimana yang dilakukan Belanda, maka rakyat Indonesia bereaksi untuk mengadakan perlawanan. Pada bulan Januari 1945 terjadi serangan balik dari pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat terhadap pertahanan Jepang di Pasifik, pulau Luzon Philipina dan Manila. Penyerangan ini mengakibatkan Jepang kehilangan harapan untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Sebagai upaya untuk mengelabui bangsa Indonesia, maka Jepang segera membentuk BPUPKI sebagai langkah awal memenuhi janji Koiso tentang kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari.

BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat mulai bekerja pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 hasil kerjanya adalah tentang konsep dasar negara Indonesia atau Pancasila dan Piagam Jakarta. Ketua badan tersebut melaporkan hasil kerjanya kepada pemerintah Jepang, terjadi perubahan mendadak, dimana posisi Jepang semakin terjepit, kemudian bom atom dari pasukan Sekutu telah menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Sebagai upaya melanjutkan tugas BPUPKI, maka segera menggantikan dengan membentuk PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno. Tugas ini untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan ada pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia.

Setelah mendengar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu telah sampai kepada pemimpin bangsa Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Meski terjadi pro dan kontra antara golongan nasionalis muda dengan golongan nasionalis tua tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sebagai puncak perdebatan atas peristiwa Rengasdengklok dengan menculik kedua Proklamator Kemerdekaan Indonesia Mohammad Hatta dan Soekarno.

Daftar Pustaka

- Deliar Noer, 1982, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.
- Kahin, George MC Turnan, 1995, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Kuntowijoyo, 1980, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Moedjanto, G., 1988, *Indonesia Abad 20 Jilid 1*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mohammad Ridwan Indra. 1987. *Peristiwa-peristiwa di Sekitar Proklamasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Hatta, 1970, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Djakarta: Tintamas.
- Reid, Anthoni J.S. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia (Terjemahan Pericles G. Katoppo)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sartono Kartodirdjo. 1994, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suhartono, 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional : dari Budi Utomo sampai Proklamasi (1908-1945)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sumarno, A.J. 1991. *Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.